

INTISARI

Wilayah laut Indonesia memainkan peran penting dalam jalur perjalanan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Perairan Indonesia, terutama Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I di Selat Sunda, dianggap sebagai salah satu koridor pelayaran paling padat di dunia karena posisi strategisnya. Sebaliknya, aktivitas pelayaran internasional dan domestik yang terjadi di ruang laut yang relatif terbatas dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti konflik navigasi, kecelakaan kapal, tekanan terhadap lingkungan laut, dan gangguan terhadap stabilitas ruang laut pesisir.

Indonesia telah menetapkan skema pemisahan lalu lintas (TSS) di ALKI I Selat Sunda untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan menjaga lingkungan laut. Namun, *International Maritime Organization* (IMO) tidak menyetujui penetapan ITZ di sisi timur TSS Selat Sunda, yang menyebabkan ketidakseimbangan spasial dalam tata kelola rute pelayaran. Kondisi ini menimbulkan kemungkinan konflik navigasi di wilayah pesisir Banten serta dampak terhadap ketahanan wilayah laut. Sampai saat ini, sangat sedikit penelitian yang menghubungkan penataan jalur pelayaran melalui ITZ dengan gagasan ketahanan wilayah laut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan ITZ Timur TSS Selat Sunda, merumuskan model ITZ yang sesuai dengan karakteristik pelayaran di wilayah tersebut, menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong penerimaan internasional melalui forum IMO, serta menilai dampaknya terhadap ketahanan wilayah laut di Provinsi Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pemangku kepentingan terkait serta analisis berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan ITZ Timur TSS Selat Sunda merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan keselamatan navigasi, melindungi lingkungan laut, serta memperkuat pengelolaan ruang laut nasional. Model ITZ yang direkomendasikan mencakup seluruh perairan sisi timur TSS Selat Sunda dengan mempertimbangkan prinsip kartografi kelautan internasional dan karakteristik lalu lintas pelayaran setempat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penetapan ITZ berpotensi meningkatkan ketahanan wilayah laut melalui penguatan aspek geografi, sumber daya alam, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bahwa penataan jalur pelayaran internasional melalui ITZ dapat diposisikan tidak hanya sebagai instrumen keselamatan navigasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah laut negara kepulauan.

Kata kunci: Selat Sunda, *Inshore Traffic Zone*, ALKI, Ketahanan Wilayah Laut

ABSTRACT

Indonesia's maritime territory constitutes an important segment of international shipping routes. The increasing intensity of maritime traffic has implications for maritime security and navigational safety, particularly in narrow waters such as the Indonesian Archipelagic Sea Lane (ALKI) I in the Sunda Strait. The Sunda Strait is a strategically important maritime area with significant potential for natural resource development and other economic activities. Indonesia has been recognized as the first archipelagic state to establish a Traffic Separation Scheme (TSS) in an Archipelagic Sea Lane, specifically in ALKI I of the Sunda Strait. The existing TSS is complemented by an Inshore Traffic Zone (ITZ) on its western side. However, the presence of only a single ITZ has created several challenges related to navigational safety and marine environmental protection, particularly in the eastern waters of the Sunda Strait TSS adjacent to Banten Province. This condition has implications for the resilience of the maritime region in the eastern Sunda Strait.

This study aims to: (1) analyze the urgency of establishing an Eastern ITZ in the Sunda Strait TSS; (2) formulate an appropriate model for the Eastern ITZ; (3) examine the efforts of the Government of Indonesia to promote the establishment of the Eastern ITZ at the international level; and (4) evaluate the impact of establishing the Eastern ITZ on the resilience of the maritime region in Banten Province.

This research employs a qualitative approach. Primary data were collected through interviews with key informants from relevant government regulatory institutions directly involved in maritime transportation, defense and security, and national resilience. These data were complemented by secondary sources derived from various academic and policy literatures.

The findings suggest that proposing the development of an Eastern ITZ in the Sunda Strait TSS to the International Maritime Organization (IMO) is crucial for navigational safety, commercial interests, and marine environmental protection. The suggested model for the Eastern ITZ includes the complete eastern seas of the Sunda Strait TSS, adhering to international marine cartography standards. Moreover, the Government of Indonesia must relaunch the National Proposal Team for the Eastern ITZ to advance diplomatic initiatives within the IMO framework to secure international recognition. The creation of the Eastern ITZ in the Sunda Strait TSS may improve the maritime regional resilience index in Banten Province, directly bolstering geographic, natural resource, economic, and defense and security resilience, while indirectly aiding demographic, ideological, political, and socio-cultural resilience.

Keywords: Sunda Strait, Inshore Traffic Zone, Maritime Regio